

Kepemimpinan: Melampaui Feodalisme dan Primordialisme

oleh Corrie van der Ven

"Mau tidak mau, bangsawan merupakan orang yang paling cocok untuk memimpin." Begitu ungkapan salah satu mahasiswa STT-Intim bulan ini. Ungkapan lain adalah dari mahasiswa UKIP, ketika saya membawa materi tentang kepemimpinan: "Tidak demokratis jika ketua senat mahasiswa tidak berasal dari suku yang terbesar di kampus ini." Dua ungkapan ini mendorong saya untuk berpikir terus. Pikiran-pikiran saya diarahkan oleh dua konsep dasar: demokrasi (dari pada feodalisme atau kebangsawanan) dan multikulturalisme (dari pada primordialisme dan kompartimentasi). Bagian pertama, tentang feodalisme, adalah produk dari diskusi-diskusi dalam kelas 'antropologi budaya'. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang memberi masukan selama debat ini tentang kebangsawanan. Harapan saya adalah bahwa mahasiswa tetap memberi *feedback* kepada saya, karena diskusi ini belum selesai dan 'bias Barat' atau pandangan dangkal saya tetap perlu dikoreksi.



Feodalisme atau kebangsawanan

Kita mulai dengan **ungkapan yang pertama**, "bangsawan merupakan orang yang paling cocok untuk memimpin". Dengan kata lain, kasta¹ yang paling tinggi memimpin sementara kasta-kasta bawah tidak pernah memimpin. Saya mengerti ungkapan ini, memang benar bahwa dalam masyarakat tradisional para bangsawan adalah sangat layak untuk memimpin. Itu berhubungan dengan pengalaman dan pendidikan mereka.

Pendidikan dalam masyarakat tradisional terjadi secara turun-temurun: anak-anak belajar dari bapak dan ibunya. Itu berarti bahwa anak petani belajar tentang pertanian, anak dari tua-tua adat belajar tentang adat dan kepemimpinan. Wajar saja bahwa anak petani adalah yang paling cocok untuk menjadi petani dan anak kepala adat yang paling cocok

untuk menjadi kepala adat. Dalam masyarakat tradisional belum ada pendidikan formal (sekolah) di mana anak-anak bisa memilih antara ilmu pertanian dan ilmu pemerintahan.

Tetapi, bagaimana dengan pembagian tugas agraris dan kepemimpinan dalam masyarakat tradisional waktu sistem pendidikan formal masuk?

Jawabannya bergantung pada akses ke pendidikan ini. Kalau akses pendidikan terbatas, misalnya karena mahal, maka ada kemungkinan besar bahwa hanya anak dari orang kaya, yaitu bangsawan, bisa ke sekolah sampai perguruan tinggi. Hal itu berarti bahwa stratifikasi sosial yang lama dilanjutkan saja: bangsawan tetap menjabat sebagai pemimpin (ekonomis, politik, sosial). Akan tetapi kalau akses pendidikan tidak terbatas, karena murah atau gratis, maka semua anak bisa ke sekolah sampai perguruan tinggi. Stratifikasi sosial tidak lagi berdasarkan kelahiran (seperti dalam masyarakat tradisional) tetapi berdasarkan ketrampilan dan pengetahuan. Pergeseran itu tidak berarti bahwa para bangsawan tidak lagi memimpin. Pasti banyak bangsawan tetap menjadi pemimpin, tetapi perbedaan adalah bahwa kepemimpinan mereka terutama terkait dengan kemampuan pribadi, bukan kelahiran. Pergeseran itu juga berarti bahwa anak-anak hamba yang cerdas dan berpendidikan tinggi juga bisa layak untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, kalau SBY menyediakan pendidikan murah atau gratis untuk semua orang, maka di masa depan ungkapan "bangsawan merupakan orang yang paling cocok untuk memimpin" semakin susah dipertahankan.²

Kepemimpinan yang suci

Walaupun pendidikan sekarang masih mahal, sudah ada cukup banyak orang dari kasta atau kelas bawah yang mengikuti pendidikan tinggi (misalnya karena sistem beasiswa), kemudian menjadi pemimpin yang sebaik pemimpin bangsawan.

Mengapa mahasiswa STT-Intim tetap berpendapat bahwa bangsawan lebih layak? Saya rasa bahwa hal itu berhubungan dengan budaya tradisional yang kental, di mana kekuasaan bangsawan pernah ditafsirkan secara metafisis. Dengan kata antropologis: ada *mistifikasi* (sakralisasi, legitimasi, pembenaran) dari kepemimpinan atau hubungan



kekuasaan, dalam hal ini: subordinasi. Keyakinan adalah bahwa bukan manusia yang pernah menentukan bahwa bangsawan menjadi pemimpin, tetapi para leluhur dan dewata. Jadi, kebangsawanan tidak dipahami sebagai 'konstruksi sosial' (ciptaan manusia), tetapi sebagai hal 'esensial' (atau sakral) yang kita hormati sampai selama-lamanya³.

Sekarang kepercayaan kepada dewata ditinggalkan, tetapi kepercayaan pada kelayakan para bangsawan masih ada, malah tetap 'di-esensialkan' atau disakralkan. Sebagai contoh, menurut orang Bugis-Makassar kaum bangsawan suku mereka mempunyai sifat-sifat yang mewah: mereka 1) *magetteng* (sikap konsisten, teguh pada pendirian), 2) *malempu* (jujur) dan 3) *sipakatau* (menghargai sesama manusia). Para bangsawan disucikan, menjadi 'superman'. Contoh lain: pemimpin Toraja adalah 1) *sugi'* (kaya), 2) *bida* (turun dari langit dengan wawasan yang luas), 3) *barani* (berani), 4) *manarang* (pandai, misalnya pandai berdoa, pandai berbicara) dan 5) *kinaa* (berbudi). Menurut adat Toraja hanya *parenge'* (bangsawan) memiliki sifat-sifat itu.⁴

Anggapan seperti itu perlu dide-mistifikasikan. Pasti ada (tapi tidak semua) bangsawan Bugis-Makassar yang konsisten, jujur dan menghargai orang lain; pasti ada (tapi tidak semua) bangsawan Toraja yang kaya, bijaksana, berani, pandai dan berbudi. Tetapi sifat-sifat ini tidak ditentukan oleh para leluhur, dewata atau Tuhan karena mereka lahir sebagai bangsawan. Tuhan tidak menciptakan kelompok tertentu yang begitu indah, mewah dan eksklusif, tetapi Tuhan menciptakan semua orang menurut gambar Tuhan.

Yang menarik adalah bahwa walaupun ada aspek-aspek 'esensial' dalam pelajaran adat, adat juga bersifat praktis. Yaitu, dalam banyak adat ada 'badan kontrol' yang memantau tua-tua adat. Dengan demikian diakui bahwa bangsawan tidak selalu konsisten, jujur, berbudi, dsb.

Back to earth: hubungan ketergantungan

Bulan yang lalu saya mengikuti baksos di Tana Toraja, bersama mahasiswa STT INTIM angkatan 2003. Saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan kepala adat tentang kepemimpinan Aluk Todolo. Kepala adat sendiri dikontrol oleh 36 pengontrol, *tau a'pa'*,

dari 9 kampung. Kepala adat menjelaskan bahwa memantau bangsawan dan –kalau perlu- memberi sanksi kepada bangsawan adalah sesuatu yang sangat penting, karena bangsawan bertanggung jawab dan diharapkan tulus, suci dan dapat dipercaya. Kalau bangsawan melanggar misalnya hukum tanah, maka mereka, seperti orang lain, harus berkeliling kampung untuk dipukul dan diejek⁵, kemudian membayar beberapa ekor ayam, babi atau kerbau. Jumlah hewan yang dibayar oleh bangsawan melampaui jumlah yang dibayar oleh rakyat. Waktu saya mendengar penjelasan *ambe*, saya terkesan: Aluk Todolo masuk akal.

Akan tetapi saya tidak hanya berbicara dengan kepala adat tentang kepemimpinan Aluk Todolo, tetapi juga dengan beberapa orang lain di kampung, termasuk orang dari kasta bawah. Ada orang kurang mampu yang putus asa karena mereka senantiasa diwajibkan untuk memberi daging kepada kepala adat. Ada juga yang mengeluh karena kepala adat sendiri melanggar adat tetapi jarang diberi sanksi. Kelihatannya praktek Aluk Todolo tidak selalu sesuai dengan teori yang indah. Saya diberitahu oleh beberapa anggota gereja bahwa cukup banyak orang kasta bawah dirugikan oleh aturan-aturan adat, karena milik mereka yang sedikit tetap disalurkan kepada bangsawan. Kita sudah tahu bahwa kaum bangsawan Toraja adalah *sugi'* (kaya), tetapi pertanyaan sekarang adalah kekayaan mereka dari mana? Mereka bersifat *sugi'* karena mereka turun dari langit sebagai orang kaya? Atau bekerja lebih keras dari pada kaum hamba? Atau senantiasa dikayakan oleh rakyat?

Hal seperti itu hampir tidak bisa dipersoalkan karena hubungan ketergantungan antara bangsawan dan kasta bawah adalah kuat. Bangsawan merupakan jaminan sosial-ekonomis buat kasta-kasta bawah. Hubungan ketergantungan berarti bahwa kasta bawah hampir tidak pernah menggugat bangsawan. Masalah ini melekat pada budaya tradisional di mana tidak ada pemisahan kekuasaan: bangsawan adalah pemimpin politik, ekonomis sekaligus sosial. Kalau bangsawan diadakan sebagai tokoh politik, ada kemungkinan bahwa mereka sebagai tokoh (penguasa) sosial dan ekonomis membalas dendam terhadap para pengadu. Dengan kata lain, kalau saya sebagai rakyat membantah bangsawan, maka ada risiko bahwa saya tidak dibantu kalau misalnya anak saya



harus diobati di rumah sakit. Akibatnya saya tidak berani untuk menggugat pemimpin karena pemimpin saya sekaligus pelindung sosial-ekonomis saya.

Ada alasan lain mengapa kasta-kasta bawah jarang menggugat kaum bangsawan yang kurang bijaksana atau menindas. Kasta-kasta bawah dibesarkan dan disosialisasikan dengan ide bahwa kaum bangsawan adalah berkat, mengayomi secara baik dan mewujudkan kesejahteraan untuk semua orang. Tidak ada pendidikan di mana daya kritis dipromosikan, *to say the least*. Wajar bahwa kasta-kasta bawah jarang memberontak.⁶ Sikap pasrah dari rakyat ini sering dimanfaatkan untuk menjelaskan bahwa kebangsawanan memang didukung dan dihargai oleh seluruh masyarakat, termasuk kasta yang terbawah.

Jadi, secara resmi ada kontrol dalam masyarakat tradisional, tetapi pada kenyataan kontrol itu tidak gampang diwujudkan, karena rakyat bodoh (dibodohkan) atau takut (kehilangan perlindungan sosial-ekonomis).

Kontrol atau pengawasan pemimpin adalah krusial kalau kita mendebatkan kepemimpinan. Kalau pemimpin susah disalahkan, maka pada prinsipnya para pemimpin bebas untuk melakukan apa saja. Suara rakyat tidak didengarkan.

Warga negara: hak dan kewajiban yang sama

Budaya kebangsawanan atau feodalisme mempunyai baik kekuatan maupun kelemahan sebagai struktur. Pertanyaan sekarang adalah apakah struktur sosial ini bisa dipertahankan dalam zaman modern ini atau tidak.

Dalam diskusi di kelas ada paling tidak tiga suara (yang agak seimbang secara kuantitatif). Suara yang pertama menyatakan bahwa *kebangsawanan dan adat* (dua segi dari satu mata uang) memang *harus dipertahankan*, karena kebangsawanan adalah budaya kepemimpinan yang murni dan sudah lama mengakar pola hidup. Kaum bangsawan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Kebangsawanan menjamin kesejahteraan kaum

budak. Kalau kita menghapus kebangsawanan, maka juga adat akan hilang dan lebih parah lagi, identitas kita akan hilang. Jangan sampai negeri Indonesia tanpa adat dan warga negara tanpa identitas.

Apa sebenarnya dimaksudkan dengan 'adat' dan 'identitas'? Apakah adat bersifat statis, murni dan monolitik, seperti semacam batu keras? Apakah adat pernah 'murni'? Apakah adat tidak boleh dirubah? Kenyataan adalah bahwa adat terus-menerus berubah, misalnya karena pengaruh agama Kristen atau Islam. Pertanyaan saya adalah apakah struktur feodal (subordinasi dalam adat) bisa ditransformasikan tanpa kepudaran total dari budaya lokal. Mungkin bisa, mungkin tidak. Seandainya tidak bisa, maka pertanyaan berikut adalah apakah 'melestarikan budaya lokal' adalah tujuan utama dalam hidup kita atau 'mewujudkan kesejahteraan untuk sebanyak mungkin orang'? Melestarikan budaya lokal secara *coûte que coûte* (dengan konsekuensi apapun) tidak boleh diperjuangkan menurut saya. Kita selalu harus menilai realitas budaya secara kritis (dalam bahasa teologis: suara kenabian tetap dibutuhkan).



Mengenai identitas kita: sejauh mana identitas kita hanya ditentukan oleh adat? Bukankah identitas kita juga ditentukan oleh iman Kristen, media masa, dsb.? Identitas kita dinamis dan semakin multikultural (lihat juga di bawah). Jangan takut bahwa

identitas kita akan hilang karena budaya lokal ditransformasikan.

Selain itu, saya rasa bahwa, kalau kita berbicara tentang kehilangan identitas akibat kehilangan adat, ada kecenderungan kuat untuk memikirkan identitas kaum bangsawan saja, bukan identitas kaum budak. Bagaimana dengan identitas, martabat dan harga diri dari orang yang paling rendah dalam sistem kebangsawanan? Apakah ada kemungkinan bahwa identitas mereka –daripada semakin pudar– semakin kuat dalam masyarakat yang lebih setara?

Suara kedua mengatakan bahwa *struktur kebangsawanan harus dipertahankan*, tetapi *orang dalam struktur* harus menjadi 'murni' dan 'profesional'. Diakui bahwa ada kesenjangan antara adat yang resmi dan kenyataan. Ada orang yang

dirugikan oleh struktur sosial ini, khususnya orang dari kasta bawah. Perlu pertobatan atau 'transformasi budaya' supaya semua orang, baik bangsawan maupun budak, diperlakukan secara manusiawi dan kristiani, sesuai dengan aturan adat dan ayat-ayat Alkitab. Akan tetapi apakah pendekatan ini mewujudkan transformasi budaya yang sungguh-sungguh? Apakah pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan 'mistifikasi' dari subordinasi melalui argumen romantis atau teologis yang tertentu? Apakah sistem feodal dalam Alkitab memberi izin kepada kita untuk melestarikan feodalisme di dunia kita? Atau ada lebih baiknya untuk men-de-kontekstualisasikan sistem feodal dalam Alkitab?

Suara ketiga menyatakan bahwa bukan *orang dalam struktur* kebangsawanan, tetapi *struktur* kebangsawanan sendiri perlu dipersoalkan. Mau tidak mau kita tidak hanya hidup dalam konteks lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Kita tidak lagi bisa menyangkal bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Etika yang lebih universal (dicerminkan dalam HAM) menekankan keadilan dan kesetaraan. Dalam sistem kebangsawanan ada ketidakadilan yang susah dapat digugat dan ketidaksetaraan yang tidak dapat digugat sama sekali. Jelas bahwa kebangsawanan tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi kita bersama ke arah demokrasi, di mana semua orang dengan talenta yang tertentu bisa menjadi pemimpin, baik orang yang lahir sebagai bangsawan maupun orang yang lahir sebagai budak. Demokratisasi adalah proses lama yang hanya bisa dicapai melalui proses penyadaran dan pendidikan (formal dan non-formal) yang bermutu dan tidak terbatas, supaya tidak hanya kelompok yang tertentu tetapi semua orang mempunyai peluang untuk mewujudkan talenta-talenta, termasuk talenta untuk memimpin.

Primordialisme atau 'kawan-lawan'

Ungkapan kedua adalah bahwa "tidak demokratis jika ketua senat mahasiswa tidak berasal dari suku yang terbesar di kampus ini". 70% persen dari mahasiswa UKIP adalah orang Toraja, jadi dianggap aneh kalau ketua senat bukan mahasiswa Toraja. Apakah orang Sumba atau Jawa bisa memahami dan memperjuangkan kepentingan orang Toraja? Bagaimana dengan demokrasi kalau kepentingan mayoritas tidak diperhatikan? Saya mengerti pendapat mahasiswa UKIP, tetapi saya kira pendekatan ini adalah lebih primordial dari pada demokratis.

Pola pemikiran primordial adalah warisan budaya tradisional di mana ada dikotomi kuat antara 'kami' dan 'mereka' (kawan-lawan). Pada umumnya budaya tradisional waktu dulu adalah budaya yang keras: *to survive or not to survive, that's the question*. 'Kami' memperjuangkan kepentingan kami supaya kami *survive*. 'Kami' mempunyai adat yang indah, penuh dengan nilai kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas, tetapi... nilai-nilai ini 'berhenti' di pinggir komunitas kami (atau komunitas kawan kami). Orang di luar lingkaran 'kami', jadi 'mereka', tidak dipedulikan sampai dimusuhkan. Dalam masyarakat tradisional *moral circle* itu tidak dilampaui (*passing over*). Rasa kekeluargaan dan persaudaraan sangat kuat, tetapi ada ongkos yang cukup tinggi: tidak ada moralitas terhadap dan solidaritas dengan orang di luar *moral circle* kami⁷. Hal itu juga melestarikan KKN: KKN dibenarkan kalau komunitas kita sendiri diuntungkan, tidak apa-apa kalau komunitas lain dirugikan.

Keperimpinan dalam masyarakat multikultural

Kita sebagai anggota civitas akademika berada dalam zaman modern, atau paling tidak dalam zaman transisi. Yang pasti adalah bahwa kita hidup dalam masyarakat multikultural. Pertanyaan adalah apakah kita sebagai pemimpin boleh mempertahankan kepentingan kelompok 'kami' dalam masyarakat atau kampus multikultural. Saya kira tidak ada alasan kuat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok 'kami', walaupun ada situasi yang tertentu di mana hak-hak 'putra daerah' harus dibela⁸. Kita sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kampus multikultural berpikir dan bertindak sebagai warga negara, bukan sebagai anggota komunitas lokal. Politik identitas harus diabaikan.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan, memperhatikan dan memberdayakan semua orang, baik yang merupakan mayoritas maupun minoritas, baik orang 'kami' maupun orang 'mereka'. Itu berarti bahwa kadang-kadang kita mengabaikan kepentingan kita sendiri (kelompok kita sendiri) kalau ada tabrakan dengan kepentingan umum. Dalam zaman globalisasi pemimpin mempunyai etika dan tanggung jawab global, bukan yang lokal, etnis atau pribadi.

Jadi, ada baiknya kalau pemimpin memahami dan memperhitungkan multikulturalisme dalam masyarakat kita. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan multikulturalisme? Ada beberapa konsep. Satu konsep adalah bahwa negara multikultural adalah negara penuh dengan kultur masing-masing

yang terpisah sekaligus digabung melalui ideologi atau retorik nasionalis (model 'fruit salad' atau 'gado-gado'). Ini bukan konsep yang dimaksudkan di sini. Konsep ini terlalu mengkotak-kotakkan negara ('kompartimentasi') dan hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih bermanfaat kalau kita mengakui bahwa dalam zaman globalisasi tidak hanya *negara* tetapi juga *warga negara* bersifat multikultural. Identitas kita tidak lagi 'monokultural', karena kita dipengaruhi oleh beberapa kultur dan sub-kultur. Ada perbedaan besar antara seorang laki-laki yang Bugis, beragama Kristen, tinggal dan bekerja di Soppeng sebagai petani dan seorang perempuan yang Bugis, beragama Islam dan mengajar di UI di Jakarta. Dua orang ini adalah orang Bugis, tetapi apakah mereka bisa dimasukkan ke dalam satu kotak dengan *label* 'Bugis'?

Identitas kita semakin multikultural. Dengan pengakuan ini, kecenderungan untuk mengkotakkan (menstereotipkan) orang sebagai orang Bugis, orang Toraja, orang Barat, akan hilang. Akibatnya sukuisme, primordialisme, etnosentrisme, gossipisme atau isme apapun akan diatasi (*says the optimist...*). Pemimpin di UKIP tidak lagi dicirikan sebagai pemimpin Toraja atau pemimpin Sumba, tetapi sebagai pemimpin yang mampu atau tidak untuk memimpin dan memberdayakan mahasiswa UKIP.

Penutup

Dalam artikel ini saya coba untuk membahas kepemimpinan dalam masyarakat demokratis. Saya menjelaskan bahwa paling tidak ada dua hal yang krusial dalam penjelmaan demokrasi. Hal pertama adalah pengawasan para pemimpin. Hal kedua adalah kepemimpinan yang tidak berbau primordial.

Kita tahu bahwa dua hal itu masih merupakan masalah. Di mana-mana para pemimpin tetap susah dibantah: dalam keluarga, gereja, kampus, kampung dan negara. Masih berbahaya untuk menggugat bapak yang keras, pendeta yang tidak kudus, dosen yang otoriter, kepala adat yang melanggar aturan, hakim yang korup atau presiden yang lemah. Selain itu kepemimpinan dan kepentingan kelompok diri sendiri masih sangat terkait.

Untuk belajar demokrasi, jadi untuk belajar pengawasan pemimpin dan melampaui dikotomi 'kami-mereka', mari kita mulai di kampus kita. Bagaimana kita semua, baik mahasiswa maupun dosen dan staf lain, bisa menjadi semakin kuat dalam proyek demokrasi ini?

Mungkin kita bisa mulai dengan membongkar ide bahwa orang di atas tidak bisa atau tidak boleh dikecam atau dikritisi. Dosen, pendeta atau pemimpin umum bukan pemimpin yang kudus atau sempurna. Ide ini mirip 'mistifikasi' dari subordinasi yang dibahas di atas. Bukankah Raja Daud dikecam dan digugat? Menutup mata terhadap kesalahan pemimpin-pemimpin bukan sesuatu yang Alkitabiah. Tetapi tunggu - saya sudah dengar suara mahasiswa: 'kalau saya mengecam dosen, saya pasti menerima nilai C atau E'. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pokoknya kita mengakui di sini bahwa transparansi, jadi penjelasan tentang proses penilaian, adalah penting, supaya cukup jelas bahwa dosen tidak berkeinginan untuk membalas dendam dan tetap menjadi terbuka terhadap pertanyaan kritis.

Hal yang kedua, kepemimpinan tanpa kepentingan kelompok diri sendiri, bisa diatasi dengan mewujudkan kampus multikultural yang sungguh-sungguh. Bukan menurut model gado-gado (sayur adalah suku-suku atau utusan-utusan, saus kacang adalah peraturan akademik dan warna ungu), tetapi sesuai dengan pengakuan bahwa anggota-anggota civitas akademika tidak hanya ditentukan oleh sukunya, tetapi oleh banyak kultur dan sub-kultur, termasuk kultur kecendekiawan. Mengapa lebih baik untuk tidak *terlalu* menekankan identitas suku atau utusan kita? Pertama, karena ada bahaya kepemimpinan KKN. Kedua, karena kita tidak hanya mempersiapkan diri kita sendiri untuk kembali ke hidup lokal, tetapi juga untuk masuk hidup global. Mengapa tidak mulai dengan meninggalkan *pelembagaan* suku dan utusan (terima kasih Yusuf) di kampus kita. Itu tidak berarti bahwa mahasiswa dari suku atau utusan yang sama tidak pernah boleh berkumpul (ada alasan-alasan kuat untuk melakukan hal itu?), tetapi hal itu berarti bahwa kita menjadi serius dalam usaha untuk menciptakan masyarakat multikultural dan demokratis.

Di kantor STT-Intim, di atas meja kerja Pak Mojau, ada banyak buku. Salah satu buku berjudul: *Multikulturalisme: Politik Kesetaraan dan Keadilan Mayoritas-Minoritas. Kewargaan Multikultural*, oleh Will Kymlicka. Di halaman 294 pengarang bertanya: 'Mengapa kita tidak dapat memperlakukan orang sebagai individu tanpa memandang identitas etnis dan marganya? Mengapa kita tidak dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang kita miliki bersama sebagai manusia, dan bukan pada hal-hal yang membedakan kita? Siapa mau menjawab?'

Dra. Corrie van der Ven adalah dosen STT INTIM di bidang antropologi dan penelitian sosial.



Kepustakaan

Budianta, Melani, *Multiculturalism: In Search Of A Framework For Managing Diversity In Indonesia*, makalah, 2003

Buranuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, 2003

Jones, Sidney, *What's Indonesia going to look like in five years?*, ceramah di Amsterdam, 25 Agustus 2004

Knitter, Paul F., *Satu Bumi Banyak Agama. Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 1995

Catatan Kaki:

¹ Dalam artikel ini saya menyamakan kebangsawanan, sistem kasta dan feodalisme. Kebangsawanan, sistem kasta dan sistem feodal merupakan stratifikasi sosial berdasarkan kelahiran (*ascribed status*). Berbeda dengan 'kelas' yang merupakan strata yang mencerminkan kedudukan sosial-ekonomis pada saat yang tertentu (*achieved status*). Mobilitas sosial adalah minimal kalau stratifikasi sosial berdasarkan kelahiran, mobilitas sosial adalah lebih tinggi kalau stratifikasi sosial berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan.

² Argumentasi tentang kesenjangan antara kasta tinggi dan kasta bawah mirip argumentasi tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan : 'anak-anak perempuan yang cerdas dan berpendidikan tinggi juga layak untuk menjadi pemimpin'. Budaya feodal adalah budaya patriarkhal. Jadi, puncak demokrasi di Indonesia adalah presiden perempuan dari kasta bawah (sekaligus anak mantan-komunis, lesbian, berkulit hitam dan penganut agama suku.... *imagine...*).

³ Dalam diskusi di kelas dikatakan oleh beberapa mahasiswa bahwa kebangsawanan penuh dengan "nilai-nilai sakral" yang harus dihormati.

⁴ Menarik untuk membandingkan sifat-sifat ini dengan sifat-sifat pemimpin dalam Alkitab. Misalnya Muza menggagap, Gideon tidak berani dan berasal dari suku yang paling kecil dan keluarga yang paling tidak penting, Yesus tidak kaya, dsb.

⁵ Bukan oleh masyarakat umum, tetapi oleh bangsawan. Orang dari kasta bawah dipukul dan diejek oleh semua orang.

⁶ Pada umumnya kasta-kasta bawah semakin siap untuk memberontak kalau 1) penderitaan atau penindasan terlalu besar atau 2) disadarkan oleh orang kritis.

⁷ Karena itu kita harus memikirkan kembali kaitan yang otomatis antara nilai kekeluargaan dan persaudaraan dalam adat dan nilai-nilai kristen.

⁸ Misalnya kalau hak-hak asasi dari komunitas etnis atau religius dilanggar. Di Papua kepentingan 'putra daerah' dibela akibat dominasi orang dari luar yang mempunyai kepentingan ekonomis-politik yang merugikan orang Papua. Di Pangkep kepentingan komunitas Bissu dibela karena kepercayaan orang setempat tidak diakui oleh pemerintah maupun umat Islam. Tetapi contoh-contoh ini mencerminkan pembelaan komunitas yang menghadapi pelanggaran HAM. Pembelaan atau pemberdayaan ini berbeda dengan mengklaim bahwa kelompok dominan dalam masyarakat atau kampus berhak untuk menjadi pemimpin dan kelompok minoritas dilarang masuk kepemimpinan atau kekuasaan lainnya (lihat juga Sidney Jones, 2004).

⁹ Khususnya mahasiswa yang baru tiba di kampus, dari daerah masing-masing, masih membutuhkan 'kehangatan' suku sendiri.

